

PROBLEMATIKA PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

M. Yunus Abu Bakar

elyunusy@gmail.com

UIN Sunan Ampel Surabaya Indonesia

Abstrak: Sejalan dengan perkembangan zaman timbul permasalahan-permasalahan pendidikan yang kompleks. Memasuki masa era globalisasi, dunia pendidikan di Indonesia menjadi heboh. Kehebohan tersebut bukan disebabkan oleh kehebatan mutu pendidikan nasional tetapi lebih banyak disebabkan karena kesadaran akan bahaya keterbelakangan pendidikan di Indonesia. Berbagai persoalan pendidikan muncul dan berkembang seperti rendahnya kualitas pendidikan secara umum, masalah anggaran pendidikan, tidak meratanya kesempatan pendidikan, dan mahal biaya pendidikan. Dan lebih khusus lagi, problematika juga terjadi pada profesi keguruan yang merupakan ujung tombak dunia pendidikan. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi antara lain rendahnya kualitas guru, tidak profesional dalam melaksanakan tugas keguruan, kurangnya penghargaan masyarakat terhadap profesi guru, dan tingkat kesejahteraan guru yang relatif masih rendah. Makalah ini berusaha mengidentifikasi dan memahami permasalahan-permasalahan pendidikan Islam di era globalisasi. Perlu pula dikemukakan bahwa permasalahan pendidikan yang diuraikan dalam makalah ini terbatas pada permasalahan pendidikan formal.

Kata kunci: problem pendidikan, pendidikan Islam, Indonesia.

Abstract: Along with the time, complicated educational problems emerge. Entering the era of globalization, the world of education has raised people's interest. The interest is not in the successfulness of the quality of the national education, rather it is because of the awareness of the dangers of backwardness of education in Indonesia. Various educational issues arise and evolve such as: the poor quality of education in general, budgetting problems in education, unequal educational opportunities, and the high cost of education. More specifically, the problems also occur in the teaching profession that serve as the stakeholder of education. Some emerging problems include the low quality of teachers, unprofessional performance in carrying out the tasks of teacher, lack of public recognition of the teaching profession, and teachers' welfare level which is still relatively low. This paper seeks to identify and understand the problems of Islamic education in the era of globalization. It should also be noted that the

problems of education described in this paper are limited to the issues in formal education.

Keywords: problems of education, Islamic education, Indonesia.

Pendahuluan

Salah satu pilar kehidupan bangsa adalah pendidikan, dan masa depan suatu bangsa bisa diketahui melalui sejauh mana komitmen masyarakat, bangsa ataupun negara dalam menyelenggarakan Pendidikan Nasional. Amanat konsitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dinyatakan dalam UUD 1945 dengan tegas dan jelas memposisikan pendidikan nasional pada posisi strategis sebagai instrumen perjuangan bangsa yang tidak hanya berfungsi mencerdaskan kehidupan bangsa tapi membangun bangsa, peradaban bangsa, nilai-nilai moral dan semangat perjuangan bangsa untuk mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Salah satu amanat UUD 1945 kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang memiliki visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Sejalan dengan perkembangan zaman, maka timbul permasalahan-permasalahan pendidikan yang kompleks. Memasuki masa era globalisasi, dunia pendidikan di Indonesia menjadi heboh. Kehebohan tersebut bukan disebabkan oleh kehebatan mutu pendidikan nasional tetapi lebih banyak disebabkan karena kesadaran akan bahaya keterbelakangan pendidikan di Indonesia. Berbagai persoalan pendidikan muncul dan berkembang seperti rendahnya kualitas pendidikan secara umum, masalah anggaran pendidikan, tidak meratanya kesempatan pendidikan, dan mahalanya biaya pendidikan. Dan lebih khusus lagi, problematika juga terjadi pada profesi keguruan yang merupakan ujung tombak dunia pendidikan. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi antara lain rendahnya kualitas guru, tidak profesional dalam melaksanakan tugas keguruan, kurangnya penghargaan masyarakat terhadap profesi guru, dan tingkat kesejahteraan guru yang relatif masih rendah.

Dan lebih ironi lagi, Indonesia merupakan negara yang mayoritas Islam. Akan tetapi dalam hal pendidikan, pendidikan Islam tidak menjadi mayoritas dalam kedudukan pendidikan nasional. Sudah menjadi rahasia publik bahwa pendidikan Islam dipandang selalu berada pada posisi deretan kedua atau posisi marginal dalam sistem pendidikan nasional. Padahal, pendidikan apapun itu, baik pendidikan nasional ataupun pendidikan Islam, pada hakikatnya pendidikan adalah mengembangkan harkat dan martabat manusia, memanusiakan manusia agar benar-benar mampu menjadi khalifah.¹

Yang paling tampak nyata adalah keteringgalan pada pendidikan Islam, yaitu eksistensi madrasah dan pesantren yang dulu memiliki peran strategis dalam mengantarkan pembangunan masyarakat Indonesia, kini antusias masyarakat untuk memasuki pendidikan madrasah dan pesantren mengalami penurunan yang cukup drastis. Kecuali pada pesantren yang mampu melakukan adaptasi dengan perkembangan global. Sikap pesimisme masyarakat terhadap pendidikan madrasah dan pesantren bisa dilihat dari adanya kekhawatiran universal terhadap kesempatan lulusannya memasuki lapangan kerja modern yang hanya terbuka bagi mereka yang memiliki kemampuan keterampilan dan penguasaan teknologi. Dengan demikian, pendidikan Islam diharapkan tidak saja sebagai penyangga nilai-nilai, tetapi sekaligus sebagai penyeru pikiran-pikiran produktif dan berkolaborasi dengan kebutuhan zaman. Pendidikan Islam diharapkan tidak saja memainkan peran sebagai pelayan rohaniah semata, yaitu fungsi yang sangat sempit dan suplementer, tetapi juga terlibat dan melibatkan diri dalam pergaulan global.²

Makalah ini berusaha mengidentifikasi dan memahami permasalahan-permasalahan pendidikan Islam di era globalisasi. Perlu pula dikemukakan bahwa permasalahan pendidikan yang diuraikan dalam makalah ini terbatas pada permasalahan pendidikan formal.

¹ Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21* (Safiria Insania Press dan MSI: Yogyakarta, 2003), 34.

² Imam Tholhah dan Ahmad Barizi, *Membuka Jendela Pendidikan Mengurai Akar Tradisi dan Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam*, cet. I (Jakarta: Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 4.

Makna Problematika Pendidikan

Problematika berasal dari akar kata bahasa Inggris “*problem*” artinya, soal, masalah atau teka-teki. Juga berarti problematik, yaitu ketidaktentuan. Adapun yang dimaksud dengan problematika pendidikan adalah, persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang di hadapi oleh dunia pendidikan, khususnya Negara Indonesia.³ Pendidikan ialah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup serta pendidikan dapat diartikan sebagai pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal.⁴

Sedangkan menurut Armai Arif, pendidikan adalah sebuah proses yang dilakukan untuk menciptakan manusia seutuhnya: beriman dan bertaqwa kepada Tuhan serta mampu mewujudkan eksistensinya sebagai khalifah Allah di permukaan bumi berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah (terciptanya insan kamil).⁵ Pendidikan adalah upaya membina dan mengembangkan daya cipta, karsa, dan rasa manusia menuju ke peradaban manusia yang lebih luas dan tinggi yaitu manusia yang berbudaya.⁶

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁷ Pendidikan berintikan interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam upaya membantu peserta didik menguasai tujuan-tujuan pendidikan. Interaksi pendidikan dapat berlangsung dalam lingkungan

³ Mochtar Buchori. *Spektrum Problematika Pendidikan di Indonesia* (Yogyakarta: Tiara Wacana 1994), 46-47.

⁴ Mudyahardjo dalam Syaiful Sagala, *Konsep dan Makna Pembelajaran* (Bandung: CV. Alfabeta, 2006), 3.

⁵ Armai Arif, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 16.

⁶ Syafrudin Nurdin, *Guru Profesional dan Impelementasi Kurikulum* (Jakarta: Ciputat Pers, t.th), 38.

⁷ Undang-undang RI.No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dalam Syaiful Sagala, *Konsep* (Bandung: CV. Alfabeta, 2006), 3.

keluarga, sekolah, ataupun masyarakat.⁸ Dengan kata lain bahwa pendidikan dalam praktiknya dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni pendidikan informal (keluarga), formal (sekolah), dan nonformal (masyarakat). Sehingga sebenarnya keberhasilan pendidikan nasional sangat bergantung terhadap ketiganya.

Dari ketiga jenis pendidikan tersebut di atas, pendidikan formallah yang mendapat sorotan paling tajam. Hal ini dapat dimaklumi karena keterbatasan wawasan masyarakat tentang hakikat pendidikan, dan perangkat pendidikan formal secara umum memang relatif lebih memadai dibandingkan dengan pendidikan informal dan nonformal.

Problematika Pendidikan Secara Umum

Indonesia saat ini berada dalam situasi transisi dari era sentralisasi ke era desentralisasi, upaya pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasinya yang dulu dilakukan secara terpusat oleh aparat pemerintah pusat, sekarang didistribusikan secara desentralisasi ke daerah-daerah. Demikian juga halnya urusan pendidikan, terjadi perubahan paradigma yang dulunya sarwa Negara (*state driven*) kini mulai berorientasi pada aspirasi masyarakat (*putting customers first*). Sistem dan proses pendidikan melakukan *repositioning*.⁹ Situasi dan kondisi yang demikian jelas akan menimbulkan banyak sekali problematika yang cukup kompleks, antara lain:

Unsur Guru/Pendidik

a. Rendahnya Kualitas Guru

Menurut Kusnandar¹⁰ realitas menunjukkan bahwa mutu guru di Indonesia dinilai masih rendah. Data Balitbang Depdiknas (1999) menunjukkan dari peserta tes guru PNS setelah dilakukan tes bidang studi ternyata rata-rata skor tes seleksinya sangat rendah. Dari 6.164 calon guru Biologi rata-rata skornya hanya 44,96; dari 396 calon guru Kimia ketika dites Kimia rata-rata skornya hanya 43,55; dari 7.558 calon guru Bahasa Inggris ketika dites Bahasa Inggris rata-rata skornya

⁸ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Krikulum Teori dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), 1.

⁹ Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 6.

¹⁰ Kusnandar, *Profesi Keguruan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 41.

hanya 37,57; dari 7.863 calon guru Matematika ketika dites Matematika rata-rata skornya hanya 27,67 dan dari 1.164 calon guru Fisika ketika dites Fisika rata-rata skornya hanya 27,35. Data Balitbang Depdiknas (2001) menunjukkan bahwa guru SD (negeri dan swasta) yang dinilai layak mengajar hanya 38 % dari 1.141.168 guru se-Indonesia. Begitu juga untuk jenjang menengah, jumlah guru yang dinilai layak mengajar dibawah 70 %.¹¹ Sedangkan B. Uno¹² menguraikan bahwa guru merupakan titik sentral yang strategis dalam kegiatan pendidikan. Di samping khusus diangkat untuk mengajar dan mendidik, guru dibebani tugas sebagai pelaku pembaruan. Mengingat tugasnya tersebut, masalah kelayakan mengajar menjadi persyaratan yang harus dipenuhi. Padahal, kondisi guru-guru yang ada sekarang cenderung masih memprihatinkan. Hasil survei yang berkaitan dengan kurangnya kemampuan guru dalam mentransformasikan ilmu dan keterampilan kepada siswa, dari 22.899 guru di Jakarta yang dites untuk mengetahui seberapa jauh penguasaan guru bidang studi saat mengajar tersebut memperlihatkan bahwa persentase guru yang memperoleh nilai tujuh (artinya cukup menguasai materi bidang studinya) relatif sedikit (38,96%) dibandingkan dengan mereka yang mendapat nilai kurang dari enam

b. Rendahnya Profesionalisme dan Kompetensi Guru

Sebagaimana menurut B. Uno, mengatakan sejak pelita II, peran pemerintah begitu dominan dalam menentukan kebijakan pendidikan, yang mana guru diposisikan sebagai alat politik kekuasaan untuk melanggengkan rezim orde baru melalui kekuatan partai. Sisi yang terabaikan dengan peran guru yang seperti itu adalah persoalan profesionalisme. Belum lagi pengelolaan semua kebijakan pendidikan dilakukan secara sentralistik. Penyusunan rancangan pembelajaran tidak dilakukan melalui analisis karakteristik siswa dan potensi siswa yang dapat dikembangkan siswa. Akibatnya, hasil pendidikan hanya mampu melahirkan SDM yang hanya mampu menghadapi persamaan, sementara perbedaan berfikir dianggap sebagai kelompok yang kontroversi dalam kebijakan, yang pada akhirnya hasil dari pendidikan

¹¹ Kompas, 25 Januari 2004.

¹² B. Uno, *Profesi Kependidikan*, 135.

hanya memperbanyak barisan pengangguran karena “domain” yang digarap dalam pendidikan tidak sesuai dengan potensi siswa dan SDA yang akan mereka kelola setelah selesai dari lembaga pendidikan.¹³ Banyak guru dan tenaga kependidikan masih *unqualified*, *underqualified*, dan *mismatch*, sehingga mereka tidak atau kurang mampu menyajikan dan menyelenggarakan pendidikan yang benar-benar kualitatif.¹⁴ Dan juga masih banyak guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas yaitu merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.¹⁵

c. Rendahnya Gaji Guru

Fenomena gaji guru Indonesia sangat jauh tertinggal bila dibanding dengan negeri tetangga. Gaji seorang profesor di Indonesia sangat jauh tertinggal dibanding di negara lain. Belum lagi usia pensiun seorang profesor di Indonesia berbeda dengan karyawan lainnya, mereka baru memasuki pensiun di usia 70 tahun. Apalagi kalau kita perhatikan kesejahteraan guru-guru di tingkat bawah, lebih-lebih para guru swasta. Mereka sangat mengalami kesusahan secara material. Kesenjangan kesejahteraan guru swasta dan negeri menjadi masalah lain yang muncul. Di lingkungan pendidikan swasta, masalah kesejahteraan masih sulit mencapai taraf ideal. Diberitakan Pikiran Rakyat 9 Januari 2006, sebanyak 70 persen dari 403 PTS di Jawa Barat dan Banten tidak sanggup untuk menyesuaikan kesejahteraan dosen sesuai dengan amanat UU Guru dan Dosen.¹⁶ Akibatnya tentu saja sangat berpengaruh dengan tingkat profesionalisme dan kesuriteladannya.¹⁷ Fakta lain yang sulit dipungkiri dan memprihatinkan, seorang yang menggeluti profesi guru lebih dari 39 tahun ternyata gaji pokoknya lebih rendah dari calon pegawai BUMN yang masa kerjanya kurang

¹³ Ibid., 137.

¹⁴ Musthofa Rembangy, *Pendidikan Transformatif*, 28.

¹⁵ *Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Bandung: Fokusmedia, 2003), 25.

¹⁶ Pikiran Rakyat, 9 Januari 2006.

¹⁷ Sukadi, *Guru Powerful Guru Masa Depan* (Bandung: Qolbu, 2006), 29.

dari satu tahun.¹⁸ Tilaar menyatakan bahwa kunci utama peningkatan kualitas pendidikan ialah mutu para gurunya. Dalam hal ini diperlukan penghargaan yang wajar terhadap profesi guru sebagaimana di negara-negara industri maju.¹⁹ Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Berdasarkan survei FGII (Federasi Guru Independen Indonesia) pada pertengahan tahun 2005, idealnya seorang guru menerima gaji bulanan sebesar Rp 3 juta rupiah. Sekarang, pendapatan rata-rata guru PNS per bulan sebesar Rp 1,5 juta, guru bantu Rp, 460 ribu, dan guru honorer di sekolah swasta rata-rata Rp 10 ribu per jam. Dengan pendapatan seperti itu, terang saja, banyak guru terpaksa melakukan pekerjaan sampingan. Ada yang mengajar lagi di sekolah lain, memberi les pada sore hari, menjadi tukang ojek, pedagang mie rebus, pedagang buku/LKS, pedagang pulsa ponsel, dan sebagainya.²⁰

Unsur Tujuan Pendidikan

a. Terjadi Disorientasi Tujuan Pendidikan

Tujuan Pendidikan cenderung berpijak pada kebutuhan pragmatis, atau kebutuhan pasar lapangan, kerja, sehingga ruh pendidikan islam sebagai pondasi budaya, moralitas, dan *social movement* (gerakan sosial) menjadi hilang.²¹ Padahal pada dasarnya tujuan pendidikan hanya satu, yaitu memanusiaikan manusia, atau mengangkat harkat dan martabat manusia atau *human dignity*, yaitu menjadi khalifah di muka bumi dengan tugas dan tanggung jawab memakmurkan kehidupan dan memelihara lingkungan. Tujuan pendidikan yang selama ini diorientasikan memang sangat ideal bahkan, lantaran terlalu ideal, tujuan tersebut tidak pernah terlaksana dengan baik. Orientasi pendidikan, sebagaimana yang dicita-citakan secara nasional, barangkali dalam konteks era sekarang ini menjadi tidak menentu, atau kabur

¹⁸ H.A.Malik Fajar, *Visi Pembaruan Pendidikan Islam* (Jakarta: LP3NI, 1998), 210-211.

¹⁹ H.A.R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 14.

²⁰ Republik, 13 Juli 2005.

²¹ Musthofa Rembangy, *Pendidikan Transformatif*, 20.

kehilangan orientasi mengingat adalah tuntutan pola kehidupan pragmatis dalam masyarakat Indonesia.

b. Depolitisasi Kebijakan Pendidikan

Berbagai kebijakan telah ditetapkan yang pada umumnya berada dalam kerangka perbaikan mutu pendidikan. Pengalaman yang ada menunjukkan bahwa setiap adanya pergantian menteri pendidikan dan pimpinan dalam lingkungan Depdiknas akan muncul pemikiran-pemikiran baru. Kebijakan baru cenderung tidak memiliki kesinambungan dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan sebelumnya, bahkan perubahan-perubahan kebijakan tersebut cenderung bernuansa “politis” ketimbang didasarkan perubahan filosofi serta substansi. Misalnya, kebijakan KBK yang baru saja diterapkan, baru seumur jagung dan bahkan jajaran pelaksana pendidikan belum semuanya tahu tentang apa itu KBK, mulai Maret 2006 dan diganti lagi dengan kurikulum baru yang hingga saat ini masih dicari penamaanya. Dan naifnya, masyarakat cenderung tidak memahami latar belakang lahirnya suatu kebijakan, tetapi harus menanggung segala konsekuensi adanya kebijakan-kebijakan yang dimaksud.

c. Sistem Sentralistik dalam Kurikulum.

Sistem sentralistik terkait erat dengan birokrasi atas bawah yang sifatnya otoriter yang terkesan pihak “bawah” harus melaksanakan seluruh keinginan pihak “atas”. Dalam sistem yang seperti ini inovasi dan pembaruan tidak akan muncul. Dalam bidang kurikulum sistem sentralistik ini juga mempengaruhi *output* pendidikan. Tilaar menyebutkan kurikulum yang terpusat, penyelenggaraan sistem manajemen yang dikendalikan dari atas telah menghasilkan *output* pendidikan manusia robot. Selain kurikulum yang sentralistik, terdapat pula beberapa kritikan kepada praktik pendidikan berkaitan dengan saratnya kurikulum sehingga seolah-olah kurikulum itu kelebihan muatan. Hal ini mempengaruhi juga kualitas pendidikan. Anak-anak terlalu banyak dibebani oleh mata pelajaran.²² Dalam realitas sejarahnya, pengembangan kurikulum Pendidikan Islam tersebut mengalami perubahan-perubahan paradigma, walaupun paradigma

²² Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam : Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2004), 205.

sebelumnya tetap dipertahankan. Hal ini dapat dicermati dari fenomena berikut: (1) perubahan dari tekanan pada hafalan dan daya ingat tentang teks-teks dari ajaran-ajaran agama islam, serta disiplin mental spiritual sebagaimana pengaruh dari timur tengah, kepada pemahaman tujuan makna dan motivasi beragama Islam untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan Islam. (2) perubahan dari cara berfikir tekstual, normatif, dan absolutis kepada cara berfikir historis, empiris, dan kontekstual dalam memahami dan menjelaskan ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islam. (3) perubahan dari tekanan dari produk atau hasil pemikiran keagamaan Islam dari para pendahulunya kepada proses atau metodologinya sehingga menghasilkan produk tersebut. (4) perubahan dari pola pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang hanya mengandalkan pada para pakar dalam memilih dan menyusun isi kurikulum pendidikan islam ke arah keterlibatan yang luas dari para pakar, guru, peserta didik, masyarakat untuk mengidentifikasi tujuan pendidikan Islam dan cara-cara mencapainya.²³

d. *Certificate Oriented*

Pola yang dikembangkan pada masa awal-awal Islam, yaitu *talab al-'ilm*, telah memberikan semangat dikalangan Muslim untuk gigih mencari ilmu, melakukan perjalanan jauh, penuh resiko, guna mendapatkan kebenaran suatu hadis, mencari guru di berbagai tempat, dan sebagainya. Hal tersebut memberikan isyarat bahwa karakteristik para ulama Muslim masa-masa awal dalam mencari ilmu adalah *knowledge oriented*. Sehingga tidak mengherankan jika pada masa-masa itu, banyak lahir tokoh-tokoh besar yang memberikan banyak kontribusi berharga, ulama-ulama *encyclopedic*, karya-karya besar sepanjang masa. Sementara, jika dibandingkan dengan pola yang ada pada masa sekarang dalam mencari ilmu menunjukkan kecenderungan adanya pergeseran dari *knowledge oriented* menuju *certificate oriented* semata. Mencari ilmu hanya merupakan sebuah proses untuk

²³ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 11.

mendapatkan sertifikat atau ijazah saja, sedangkan semangat dan kualitas keilmuan menempati prioritas berikutnya.²⁴

Unsur Lulusan Pendidikan

a. Rendahnya Kualitas Lulusan Pendidikan

Salah satu permasalahan esensial pendidikan yang sampai saat ini masih dihadapi bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu lulusan pendidikan pada setiap jenis, jenjang, jalur, dan satuan pendidikan. Bahkan kalau kita amati lebih cermat kondisi pendidikan di negeri ini dari hari ke hari semakin menurun kualitasnya. Menurut Kusnandar²⁵ kualitas pendidikan Indonesia dianggap oleh banyak kalangan masih rendah. Hal ini bisa dilihat dari berbagai indikator:

- 1) Lulusan dari sekolah atau perguruan tinggi yang belum siap memasuki dunia kerja karena minimnya kompetensi yang dimiliki. Menurut pengamat ekonomi Dr. Berry Priyono, bekal kecakapan yang diperoleh dari lembaga pendidikan tidak memadai untuk digunakan secara mandiri, karena yang dipelajari di lembaga pendidikan sering kali hanya terpaku pada teori sehingga peserta didik kurang kreatif dan inovatif.²⁶
- 2) Berdasar hasil penelitian tentang *Human Development Index* (HDI) yang dikeluarkan oleh UNDP 2005, saat ini kita berada pada peringkat 110 dari 174 negara yang diteliti. Jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Thailand dan apalagi dengan Cina kita jauh tertinggal. Hal ini menunjukkan betapa rendahnya daya saing SDM Indonesia untuk memperoleh posisi kerja yang baik di tengah-tengah persaingan global yang kompetitif.²⁷
- 3) Laporan *Internasional Education Achievement* (IEA) bahwa kemampuan membaca siswa SD Indonesia berada di urutan 38 dari 39 negara yang disurvei.²⁸

²⁴ Abdul Wahid, *Isu-isu Kontemporer Pendidikan Islam* (Semarang: Need's Press, 2008), 14.

²⁵ Kusnandar, *Profesi Keguruan*, 1.

²⁶ Kompas, 4 Desember 2004.

²⁷ *Human Development Index* (HDI) yang dikeluarkan oleh UNDP 2005.

²⁸ Laporan *Internasional Education Achievement* (IEA).

- 4) Mutu akademik antar bangsa melalui *Programme Student Assessment for International* (PISA) 2003 menunjukkan bahwa dari 41 negara yang disurvei untuk bidang IPA, Indonesia menempati peringkat ke-38, sementara untuk bidang Matematika dan kemampuan membaca menempati peringkat ke-39.²⁹
 - 5) Laporan *World Competitiveness Yearbook* tahun 2000, daya saing SDM Indonesia berada di posisi 46 dari 47 negara yang disurvei.³⁰
 - 6) Posisi perguruan tinggi Indonesia yang dianggap favorit, seperti UI dan UGM hanya berada pada posisi 61 dan 68 dari 77 perguruan tinggi di Asia.
 - 7) Menurut data Kemendiknas yang menyatakan bahwa sebanyak 37,06 % pemuda Indonesia hanya lulus SD. Dari 127 juta penduduk Indonesia jumlah pemuda diperkirakan 97 juta orang, dengan asumsi pemuda adalah mereka yang berusia 15–35 tahun. Dengan kondisi tersebut, sulit mengharapkan mereka menjadi agen perubahan sosial, sebagaimana yang diharapkan masyarakat luas.³¹
- b. Kemerossotan Akhlak dan Moral

Terjadi kecenderungan menurunnya akhlak dan moral yang menyebabkan lunturnya tanggung jawab dan kesetiakawanan sosial, seperti terjadinya tawuran pelajar dan kenakalan remaja dunia modern saat ini, termasuk di Indonesia ditandai oleh gejala yang benar-benar berada pada taraf yang mengkhawatirkan. karena sudah menimpa golongan dewasa hingga pelajar/remaja tunas bangsa,³² ini terjadi karena empat faktor.³³ Selain itu Haidar juga mensinyalir masalah ini terjadi karena kurangnya pemberdayaan pendidikan budi pekerti,³⁴ juga

²⁹ *Programme Student Assessment for International* (PISA) 2003.

³⁰ Laporan *World Competitiveness Yearbook* tahun 2000.

³¹ Media Indonesia, 22 Desember 2005.

³² Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), 95.

³³ Longgarnya pegangan terhadap agama sehingga lepaslah kontrol diri (*self control*), kurang efektifnya pembinaan moral oleh orang tua, sekolah, dan masyarakat, derasnya arus budaya hidup materialistik, hedonistik, dan sekularistik, belum adanya kemauan yang sungguh-sungguh dari pemerintah. Lihat Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan*, 221-222.

³⁴ Haidar Putra, *Pendidikan Islam*, 221.

disebabkan empat faktor.³⁵ Sedangkan Suwendi menyebut masalah ini dengan istilah krisis nilai karena berkaitan dengan sikap menilai suatu perbuatan, tentang baik buruk, etis dan tidak etis, benar dan salah, dan hal lain yang menyangkut etika individual dan sosial.³⁶ Tujuh masalah pokok sistem pendidikan nasional yang pertama adalah menurunnya akhlak dan moral peserta didik.³⁷ Kemudian diperparah lagi dengan dihapusnya mata pelajaran budi pekerti sejak kurikulum 1984 sehingga aspek-aspek yang berkaitan dengan budi pekerti menjadi kurang disentuh bahkan ada kecenderungan tidak ada sama sekali.³⁸ Lebih dari itu juga terjadi pergeseran dari pendidikan keluarga ke pendidikan sekolah, artinya pendidikan sekolah merupakan tumpuhan utama masyarakat.³⁹

Unsur Pembiayaan Pendidikan

a. Biaya Pendidikan

Faktor biaya pendidikan adalah hal penting, dan menjadi persoalan tersendiri yang seolah-olah menjadi kabur mengenai siapa yang bertanggungjawab atas persoalan ini. Terkait dengan amanat konstitusi sebagaimana termaktub dalam UUD 45 hasil amandemen, serta UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang memerintahkan negara mengalokasikan dana minimal 20% dari APBN dan APBD di masing-masing daerah, namun hingga sekarang belum

³⁵ Pendidikan agama terlalu kognitif, latar belakang keluarga yang beraneka ragam (ada yang belum tertata akhlaknya), pendidikan agama hanya menjadi tanggung jawab guru agama, keterbatasan waktu tidak sesuai dengan bobot materi pendidikan agama. Lihat Haidar Putra, *Pendidikan Islam*, 220.

³⁶ Suwendi, *Sejarah & Pemikiran Pendidikan Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 177-178.

³⁷ Masalah yang lain adalah pemerataan kesempatan belajar, rendahnya efisiensi internal, status kelembagaan, manajemen, dan SDM yang belum profesional. Lihat E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi* (Bandung: PT. Remaja RosdaKarya, 2006), 4.

³⁸ Sam M. Chan, Tuti T.Sam, *Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), 17.

³⁹ Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), 8.

terpenuhi. Bahkan, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan genap 20% hingga tahun 2009 sebagaimana yang dirancang dalam anggaran strategis pendidikan.

b. Ketentuan Anggaran

Ketentuan anggaran pendidikan dalam UU No. 20/2003 pasal 49 dinyatakan bahwa Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (ayat 1). Realisasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN/APBD ternyata masih sangat sulit untuk dilakukan pemerintah, bahkan skenario yang diterapkan pun masih mengalokasikan dana pendidikan dari APBN/APBD dalam jumlah yang terbatas yaitu Total Belanja Pemerintah Pusat menurut APBN 2006 adalah sebesar Rp 427,6 triliun. Dari jumlah tersebut, jumlah yang dianggarkan untuk pendidikan adalah sebesar Rp 36,7 triliun. Sedangkan asumsi kebutuhan *budget* anggaran pendidikan adalah 20% dari Rp. 427,6 triliun atau sebesar Rp. 85,5 triliun, maka masih terdapat defisit atau kekurangan kebutuhan dana pendidikan sebesar Rp 47,9 triliun. Skenario progresif pemenuhan anggaran pendidikan yang disepakati bersama oleh DPR dan Pemerintah pada tanggal 4 Juli 2005 yang lalu hanya menetapkan kenaikan bertahap 2,7 persen per tahun hingga 2009, dengan rincian kenaikan 6,6 % (2004), 9,29 % (2005), 12,01 % (2006), 14,68 % (2007), 17,40 % (2008), dan 20,10 % (2009). Bandingkan dengan anggaran yang ternyata hanya dialokasikan sebesar 8,1 % pada tahun 2005 dan 9,1 % pada tahun 2006 (Pan Mohamad Faiz: 2006). Tahun 2007 hanya mencapai 11,8 persen. Nilai ini setara dengan Rp 90,10 triliun dari total nilai anggaran Rp 763,6 triliun.⁴⁰

Unsur Metode dan Sarana Prasarana Pendidikan

a. Pendekatan/Metode Pembelajaran yang Monoton

Siswa masih banyak yang senang diajar dengan metode yang konservatif,⁴¹ seperti ceramah, didikte, karena lebih sederhana dan tidak

⁴⁰ www.tempointeraktif.com.

⁴¹ Muhaimin, *Pemikiran dan Aktualisasi*, 125.

ada tantangan untuk berfikir. Peran guru atau dosen sangat besar dalam meningkatkan kualitas kompetensi siswa/mahasiswa. Dalam mengajar, seharusnya guru mampu menggerakkan siswa/mahasiswa melalui pola pembelajaran yang kreatif dan kontekstual (konteks sekarang menggunakan teknologi yang memadai).

b. Rendahnya Kualitas Sarana Fisik

Untuk sarana fisik misalnya, banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. Sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium dan sebagainya. Belum lagi dalam masalah perkembangan teknologi, seperti pemanfaatan komputer dan internet, hampir di sekolah-sekolah kita tidak ada yang memilikinya terutama sekolah-sekolah di daerah pedalaman kondisinya masih jauh dari dikatakan layak.⁴²

Mengurai Problematika Pendidikan Islam di Indonesia

Negara Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya menganut agama Islam. Tetapi pada kenyataannya dalam hal pendidikan, pendidikan Islam tidak menjadi mayoritas dalam kedudukan pendidikan nasional. Dan pendidikan Islam dipandang selalu berada pada posisi deretan kedua atau posisi marginal dalam system pendidikan nasional. Padahal, pendidikan apapun itu, baik pendidikan nasional maupun pendidikan Islam, hakikatnya adalah mengembangkan harkat dan martabat manusia, memanusiakan manusia agar benar-benar mampu menjadi khalifah.⁴³

Pendidikan Islam diakui keberadaannya dalam sistem pendidikan yang terbagi menjadi tiga hal. *Pertama*, pendidikan Islam sebagai lembaga diakuiinya keberadaan lembaga pendidikan Islam secara eksplisit. *Kedua*, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran, diakuiinya pendidikan agama sebagai salah satu pelajaran yang wajib diberikan

⁴² Ibid., 130.

⁴³ Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan*, 156.

pada tingkat dasar sampai perguruan tinggi. *Ketiga*, pendidikan Islam sebagai nilai (*value*), yakni ditemukannya nilai-nilai Islami dalam sistem pendidikan.⁴⁴ Walaupun demikian, pendidikan Islam tidak luput dari problematika yang muncul di era global ini. Terdapat dua faktor dalam problematika tersebut, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Adapun faktor-faktor internal dalam problematika pendidikan Islam, yaitu:

Pertama, faktor manajemen pendidikan Islam yang terletak pada:

- a. Ketidakjelasan tujuan yang hendak di capai;
- b. Ketidakterkaitan kurikulum terhadap kebutuhan masyarakat;
- c. Kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas dan profesional;
- d. Salah pengukuran terhadap hasil pendidikan;
- e. Belum jelasnya landasan yang dipergunakan untuk menetapkan jenjang tingkat pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga keperguruan tinggi.⁴⁵
- f. Rendahnya kreatifitas lulusan dalam menciptakan lowongan kerja sendiri.⁴⁶

Kedua, faktor kompensasi profesional guru yang masih sangat rendah:

- a. Lemah dalam penguasaan materi bidang studi, terutama menyangkut bidang studi umum;
- b. Pendidikan Islam dikesankan sebagai lembaga yang tradisional-konservatif, adapun diantara variabel yang menjadi ukurannya adalah lemahnya metodologi pembelajaran yang cenderung tidak menarik perhatian;
- c. Lemahnya keterampilan mengajar, manajemen kelas, dan motivasi mengajar;

⁴⁴ Haidar Putra Daulay, *Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), Cet. I, 44.

⁴⁵ Muhammad Zainal Abidin, *Problematika Pendidikan di Indonesia dan solusi Pemecahannya*: posted pada 20 Februari 2010 dari <http://meetabied.wordpress.com/2010/02/20/problematika-pendidikan-di-Indonesia-dan-solusi-pemecahannya/> Diakses pada 15 Januari 2010.

⁴⁶ Moh. Raqib, *Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan pendidikan integrative di Sekolah, Keluarga dan Masyarakat* (Yogyakarta: LKiS, 2009), 89.

- d. Lemahnya kompetensi padagogik, kepribadian, profesional, dan sosial.⁴⁷

Ketiga, faktor pemimpin sekolah yang lemah :

- e. Lemahnya pemimpin dalam komunikasi dan negosiasi;
- f. Pimpinan pendidikan Islam kurang memiliki kemampuan dalam membangun komunikasi internal dengan para guru;
- g. Pimpinan pendidikan Islam lemah dalam komunikasi dengan masyarakat, orang tua, dan pengguna pendidikan untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.⁴⁸

Adapun faktor-faktor eksternal dalam problematika pendidikan Islam, meliputi⁴⁹ seperti:

- a. Alokasi dana yang diberikan pemerintah sangat jauh perbedaannya dengan pendidikan yang berada di lingkungan Diknas;
- b. Pandangan *dichotomy* dalam beberapa aspek yaitu antara Ilmu Agama dengan Ilmu Umum, antara wahyu dengan akal setara antara wahyu dengan alam;
- c. Sifat ilmu pengetahuannya yang masih terlalu general/umum (*to general knowledge*) dan kurang memperhatikan kepada upaya penyelesaian masalah (*problem solving*);
- d. Rendahnya semangat untuk melakukan penelitian/penyelidikan (*lack of spirit of inquiry*);
- e. Belajar lebih banyak bersifat *studi tekstual* daripada *pemahaman* pelajaran yang bersangkutan. Hal ini menimbulkan dorongan untuk belajar dengan sistem hafalan (*memorizing*) daripada pemahaman yang sebenarnya;
- f. Mencari ilmu hanya merupakan sebuah proses untuk mendapatkan sertifikat atau ijazah saja, sedangkan semangat dan kualitas keilmuan menempati prioritas berikutnya (*certificate oriented*);
- g. Paradigma birokrasi tentang pendidikan Islam selama ini lebih didominasi oleh pendekatan sektoral dan bukan pendekatan

⁴⁷ Qurroti Siti, Problematika Pendidikan Islam, from <http://www.scribd.com/doc/28597217/Problematika-Pendidikan-Islam>. Diakses Pada 15 Januari 2011.

⁴⁸Moh. Raqib, *Ilmu Pendidikan Islam*, 101.

⁴⁹ Abdul Wahid, *Isu-isu Kontemporer Pendidikan*, 14.

fungsional. Pendidikan Islam tidak dianggap bagian dari sektor pendidikan lantaran urusannya tidak di bawah Depdiknas;

- h. Adanya pandangan sikap diskriminatif terhadap produk atau lulusan pendidikan Islam.

Paradigma masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam masih sebelah mata. Lembaga pendidikan Islam merupakan alternatif terakhir setelah tidak dapat diterima di lembaga pendidikan di lingkungan Diknas. Pandangan masyarakat yang demikian menjadi indikator rendahnya kepercayaan mereka terhadap lembaga pendidikan Islam.

Solusi Problematika Pendidikan Islam Di Era Global

Dari pemetaan problematika pendidikan Islam di atas, penulis mencoba berikhtiar untuk memahami dan memberikan solusi alternatif, meliputi sebagai berikut:

1. Menghilangkan paradigma dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum, ilmu tidak bebas nilai, tetapi bebas untuk dinilai. Ilmu tidak memperdulikan agama dan agama tidak memperdulikan ilmu, itulah sebabnya diperlukan adanya pencerahan dan mengupayakan integralisasi keilmuan.⁵⁰
2. Merubah pola pendidikan Islam indoktrinasi menjadi pola partisipatif antara guru dan murid. Pola ini memberikan ruang bagi siswa untuk berpikir kritis, optimis, dinamis, inovatif, memberikan alasan-alasan yang logis, bahkan siswa dapat pula mengkritisi pendapat guru jika terdapat kesalahan. Intinya, pendekatan epistemologi ini menuntut pada guru dan siswa untuk sama-sama aktif dalam proses belajar mengajar.⁵¹
3. Merubah paradigma ideologis menjadi paradigma ilmiah yang berpijak pada wahyu Allah SWT. Sebab, paradigma ideologis ini karena otoritasnya dapat mengikat kebebasan tradisi ilmiah, kreatif, terbuka, dan dinamis. Praktis paradigma ideologis tidak memberikan ruang gerak pada penalaran atau pemikiran bebas bertanggungjawab secara argumentatif. Padahal, wahyu sangat

⁵⁰ Muhammad In'am Esha, *Institusional Transpormation, Reformasi dan Modernisasi Pendidikan Tinggi Islam* (Malang: UIN-Malang Press), 81.

⁵¹ Sutrisno, *Pembaharuan Dan Pengembangan Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Fadilatama, 2011), 105.

memberikan keleluasaan bagi akal manusia untuk mengkaji, meneliti, melakukan observasi, menemukan, ilmu pengetahuan (*âyat kawniyyah*)⁵² dengan petunjuk wahyu Allah SWT. Perlu dilakukan rekonstruksi kurikulum yang masih sekuler dan bebas nilai spiritual, menjadi kurikulum yang berbasis tauhid. Sebab segala ilmu pengetahuan yang bersumber pada hasil penelitian pada alam semesta (*âyat kawniyyah*) maupun penelitian terhadap ayat *qawliyyah* atau *naqliyyah* (al-Quran dan al-Sunnah) merupakan ilmu Allah SWT. Ini berarti bahwa semua ilmu bersumber dari Allah. Realisasinya, bagi penyusun kurikulum yang berbasis tauhid ini harus memiliki pengetahuan yang komperhensif tentang Islam. Karena kurikulum merupakan sarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Terkait dengan pengembangan kurikulum pendidikan Islam, hal-hal yang sifatnya masih melangit, dogmatis, dan transendental perlu diturunkan dan dikaitkan dengan dunia empiris di lapangan. Ilmu-ilmu yang berbasis pada realitas pengalaman empiris, seperti sosiologi, psikologi, filsafat kritis yang sifatnya membumi perlu dijadikan dasar pembelajaran, sehingga ilmu betul-betul menyentuh persoalan-persoalan dan pengalaman empiris.⁵³

4. Orientasi pendidikan Islam ditekankan pada pertumbuhan yang integrasi antara iman, ilmu, amal, dan akhlak. Semua dimensi ini bergerak saling melengkapi satu sama lainnya, sehingga perpaduan seluruh dimensi ini mampu menelorkan manusia paripurna yang memiliki keimanan yang kokoh, kedalaman spiritual, keluasan ilmu pengetahuan, dan memiliki budi pekerti mulia yang berpijak pada “*semua bersumber dari Allah, semua milik Allah, difungsikan untuk menjalankan tugasnya sebagai khalifah Allah dan sebagai abdullah, dan akan kembali kepada Allah (menauhidkan Allah).*”
5. Merubah pendekatan dari pendekatan teoritis atau konseptual pada pendekatan kontekstual atau aplikatif. Dari sini pendidikan Islam harus menyediakan berbagai media penunjang untuk mencapai

⁵² Syahminan Zaini, *Prinsip-prinsip Dasar Konsepsi Pendidikan Islam* (Jakarta:Kalam Mulia, 1986), 4.

⁵³ Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 152.

- hasil pendidikan yang diharapkan. Menurut perspektif Islam bahwa media pendidikan Islam adalah seluruh alam semesta atau seluruh ciptaan Allah SWT. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, “berpikirlah kamu sekalian tentang makhluk ciptaan Allah, jangan kamu berpikir tentang Allah, sesungguhnya kalian tidak akan mampu memikirkan-Nya.” (HR. Abû Shaykh dari Ibn ‘Abbâs).
6. Adanya peningkatan profesionalisme tenaga pendidik yang meliputi kompetensi personal, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional dan kompetensi sosial.⁵⁴ Sehingga dengan pemenuhan kompetensi inilah, seorang tenaga pendidik mampu menemukan metode yang diharapkan sebagaimana harapan dalam kajian epistemologis.
 7. Masalah mengatasi kemerosotan moral, adalah melalui pemberdayaan pendidikan budi pekerti,⁵⁵ pelaksanaannya melalui 5 langkah,⁵⁶ serta keteladanan.
 8. Masalah pembelajaran dikotomi, solusi yang dapat ditawarkan adalah mengintegrasikan antar sub mata pelajaran agama, dan antara mata pelajaran agama dengan mata pelajaran umum selain agama. Sehingga menghasilkan pembelajaran yang diwarnai oleh nilai-nilai keagamaan.
 9. Masalah *cognitive oriented*, solusi yang ditawarkan adalah penilaian yang itegratif. Artinya siswa dinyatakan tuntas atau berhasil bila memenuhi kriteria kognitif, afektif, dan psikomotor. Hal ini harus disadari dan dilakukan bukan sekedar jargon atau *lips service*.
 10. Masalah media massa, yang satu ini memerlukan *political will* dari pemerintah, perhatian serius dari orang tua, dan dukungan yang kuat dari semua lapisan masyarakat agar media massa benar-benar menyadari dan tidak terlalu *profit oriented* tetapi juga harus sangat memperhatikan faktor-faktor edukatif.

⁵⁴Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 116.

⁵⁵Haidar Daulay, *Pendidikan Islam*, 221.

⁵⁶Pendidikan akhlak di rumah, sekolah dan masyarakat, mengintegrasikan pendidikan dan pengajaran, akhlak menkadi tanggung jawah seluruh guru, pendidikan akhlak didukung oleh semua pihak,dan pendidikan akhlak harus menggunakan seluruh kesempatan dan perangkat yang ada. Lihat Abuddin Nata, *Manajemen*, 223-225.

11. Masalah minimnya kesejahteraan guru, hendaknya disadari oleh pemerintah, orang tua murid, dan masyarakat. Karena Ada ungkapan “*No welfare without development, no development without education, and no education without teacher,*” hal ini sulit untuk dipungkiri relevansinya dalam kehidupan suatu bangsa, sekaligus menunjukkan bahwa guru adalah ujung tombak kesejahteraan suatu bangsa.
12. Masalah kualitas, relevansi/efisiensi eksternal, elitisme, dan manajemen dapat diatasi bila pemerintah, dunia pendidikan, dan dunia usaha duduk semeja untuk merumuskan *link and match* yang sinergis.
13. Melakukan rumusan orientasi pendidikan Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Orientasi tersebut ialah sebagai berikut:⁵⁷
 - a. Pendidikan Islam harus diorientasikan untuk menciptakan “kesadaran kritis” masyarakat. Sehingga dengan kesadaran kritis ini akan mampu menganalisis hubungan faktor-faktor sosial dan kemudian mencari jalan keluarnya.
 - b. Adanya proses humanisasi dalam pendidikan Islam dimaksudkan sebagai upaya mengembangkan manusia sebagai makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang dengan segala potensi (*fitriah*) yang ada padanya. Manusia dapat dibesarkan (potensi jasmaninya) dan diberdayakan (potensi rohaninya) agar dapat berdiri sendiri dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
 - c. Pendidikan Islam sebagai pembinaan *akhlâq al-karîmah*. Akhlak merupakan domain penting dalam kehidupan masyarakat, apalagi di era globalisasi ini. Tidak adanya akhlak dalam tata kehidupan masyarakat akan menyebabkan hancurnya masyarakat itu sendiri.

⁵⁷ Ahmad Tantowi, *Pendidikan Islam di Era Transformasi Global* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), Cet. I, 90.

Catatan Akhir

Dari beberapa penjelasan singkat diatas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Hakikat pendidikan Islam ialah untuk membimbing anak didik dalam perkembangan dirinya, baik jasmani maupun rohani menuju terbentuknya kepribadian yang utama pada anak didik nantinya yang didasarkan pada hukum-hukum islam. Sedangkan hakikat dari Globalisasi bukan sekedar banjir barang, melainkan akan melibatkan aspek yang lebih luas, mulai dari keuangan, pemilikan modal, pasar, teknologi, daya hidup, bentuk pemerintahan, sampai kepada bentuk-bentuk kesadaran manusia.
2. Problematika pendidikan Islam di era global ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal yang didalamnya ada: relasi kekuasaan dan orientasi pendidikan Islam, masalah kurikulum, pendekatan/metode pembelajaran, profesionalitas dan kualitas SDM, dan biaya pendidikan. Dan faktor eksternal yang meliputi *dichotomic, to general knowledge, lack of spirit of inquiry, memorisasi, dan certificate oriented.*
3. Solusi dari problematika tersebut ialah pendidikan Islam harus dikembalikan kepada fitrahnya dengan tanpa mengesampingkan dimensi-dimensi penting lainnya yang harus dikembangkan dalam institusi pendidikan, baik formal, informal, maupun nonformal. Serta pendidikan harus dirancang sedemikian rupa yang memungkinkan para peserta didik mengembangkan potensi yang dimiliki secara alami dan kreatif dalam suasana penuh kebebasan, kebersamaan, dan tanggung jawab.
4. Pendidikan Islam di era global ini diorientasikan bahwa pendidikan Islam sebagai proses penyadaran, sebagai proses humanisasi, dan sebagai pembinaan *akhlâq al-karîmah.*
5. Bahwa dalam penyelenggaraan suatu sistem pendidikan yang bermutu dan berkualitas baik harus ada keseimbangan antara aspek yang mempengaruhi dari sistem pendidikan itu sendiri. Dari disini dalam sistem pendidikan bahwa perhatian pemerintah juga berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan.
6. Pendidikan di Indonesia mengalami berbagai problema yang sangat mendasar dan multidimensional, yaitu antara lain rendahnya

kualitas pendidikan secara umum, anggaran yang tidak sesuai atau rendah, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Selain itu masalah keguruan juga mengalami berbagai problematika yang tidak kalah peliknya antara lain rendahnya kualitas guru, kurang profesional dalam melaksanakan tugas keguruan, juga kurang efektifnya proses pembelajaran yang terjadi.

7. Ada berbagai solusi dalam mengurai permasalahan pendidikan dan keguruan di Indonesia, antara lain melakukan perubahan atas kesalahan pendidikan, efisiensi pemanfaatan anggaran pendidikan, depolitisasi kebijakan pendidikan, restrukturisasi organisasi, memposisikan pejabat pendidikan adalah mereka yang profesional, peningkatan profesionalisme guru, peningkatan kelayakan mengajar dan kesejahteraan guru, dan membentuk kebiasaan guru efektif.[]

Daftar Pustaka

- Arif, Armai. *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Pers, 2002.
- B. Uno, Hamzah. *Profesi Kependidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Buchori, Mochtar. *Spektrum Problematika Pendidikan di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.
- Daulay, Haidar Putra. *Pendidikan Islam: Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Esha, Muhammad In'am. *Institusional Transpormation, Reformasi dan Modernisasi Pendidikan Tinggi Islam*. Malang: UIN-Malang Press.
- Fajar, H.A.Malik. *Visi Pembaruan Pendidikan Islam*. Jakarta: LP3NI, 1998.
- Kusnandar. *Profesi Keguruan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Mastuhu. *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21*. Yogyakarta: Safiria Insania Press dan MSI, 2003.
- Mudyahardjo dalam Syaiful Sagala, *Konsep dan Makna Pembelajaran*. Bandung: CV.Alfabeta, 2006.
- Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- _____. *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

- _____. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mulyasa, E. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006.
- Nata, Abuddin. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media, tt.
- Nurdin, Syafrudin. *Guru Profesional dan Impelementasi Kurikulum*. Jakarta: Ciputat Pers, tt.
- Raqib, Moh. *Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan pendidikan integrative di Sekolah, Keluarga dan Masyarakat*. Yogyakarta: LkiS, 2009.
- Rembangy, Musthofa. *Pendidikan Transformatif: Pergulatan Kritis Merumuskan Pendidikan di Tengah Pusaran Arus Globalisasi*. Yogyakarta: Teras, 2010.
- Sukadi. *Guru Powerful Guru Masa Depan*. Bandung: Qolbu, 2006.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Pengembangan Krikulum Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.
- Sutrisno, *Pembaharuan Dan Pengembangan Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Fadilatama, 2011.
- Suwendi. *Sejarah & Pemikiran Pendidikan Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- T.Sam, Sam M. Tuti. *Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Tantowi, Ahmad. *Pendidikan Islam di Era Transformasi Global*. Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Tholkhah, Imam dan Barizi, Ahmad. *Membuka Jendela Pendidikan Mengurai Akar Tradisi dan Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam*, Cet. I. Jakarta: Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Tilaar, H.A.R. *Paradigma Baru Pendidikan Nasinal*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Undang-undang RI.No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dalam Syaiful Sagala, *Konsep*. Bandung: CV.Alfabeta, 2006.
- Usman, Moh. Uzer. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.

- Wahid, Abdul. *Isu-isu Kontemporer Pendidikan Islam*. Semarang: Need's Press, 2008.
- Wahid, Abdul. *Isu-isu Kontemporer Pendidikan Islam*. Semarang: Need's Press, 2008.
- Zaini, Syahminan. *Prinsip-prinsip Dasar Konsepsi Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 1986.
- Zuhairini. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.